

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kedudukan *informed consent* merupakan instrumen perlindungan hukum vital bagi pengguna layanan psikologi dalam memberikan kontrol atas informasi pribadi. Meskipun UU Kesehatan telah mengatur dasar pengungkapan informasi pribadi tanpa persetujuan, implementasinya menghadapi tantangan karena layanan psikologi tidak terbatas pada ranah klinis. UU Pendidikan dan Layanan Psikologi belum memberikan kejelasan mengenai penerapan hak-hak pengguna, sementara UU Perlindungan Konsumen memperkuat posisi pengguna layanan untuk mendapatkan informasi yang jelas.
2. Pengaturan *informed consent* dalam layanan psikologi diatur melalui tiga kerangka hukum yang saling berkaitan yaitu UU Pendidikan dan Layanan Psikologi, UU Kesehatan, dan UU Perlindungan Konsumen. Didalam UU Perlindungan Konsumen sebagai pelaku usaha yang dalam hal ini psikolog memberikan jaminan hak konsumen atas informasi yang jelas dan perlindungan data pribadi dalam layanan psikologi. Namun, masih terdapat kesenjangan regulasi terutama dalam aspek kerahasiaan data dan implementasinya di lapangan. Untuk mengatasinya, diperlukan harmonisasi ketiga undang-undang tersebut, penguatan kode etik, peningkatan kompetensi praktisi, serta perbaikan sistem pengaduan dan penegakan hukum. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan perlindungan hak pengguna layanan psikologi secara komprehensif.

B. Saran

1. Perlunya dilakukan harmonisasi antara UU Kesehatan dan UU Pendidikan dan Layanan Psikologi untuk memastikan bahwa ketentuan mengenai kerahasiaan data dan privasi pengguna layanan psikologi konsisten dan jelas di semua aspek layanan, baik klinis maupun non-klinis. Ini dapat dilakukan dengan merevisi UU Pendidikan dan Layanan Psikologi untuk memasukkan ketentuan yang lebih rinci tentang perlindungan data dan informasi pengguna, serta memberikan pedoman yang eksplisit bagi psikolog tentang kapan informasi dapat diungkapkan
2. Disarankan untuk mengembangkan pedoman praktis yang komprehensif yang merinci hak-hak pengguna layanan dan kewajiban psikolog dalam menjaga kerahasiaan dan privasi klien. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi praktisi psikologi perlu ditingkatkan untuk memastikan mereka memahami dan dapat menerapkan regulasi terkait perlindungan hak-hak pengguna secara efektif, serta mengurangi risiko pelanggaran yang tidak disengaja. Pelatihan ini harus mencakup pemahaman tentang perbedaan peraturan dalam berbagai konteks layanan psikologi dan bagaimana menerapkannya dalam praktik sehari-hari.

